

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya, pemerintah pusat mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, sedangkan pemerintah daerah bertanggung jawab melaksanakan tugas-tugas pemerintahan yang dilimpahkan kepadanya oleh pemerintah pusat melalui desentralisasi, dekonsentrasi, dan bantuan. Penerapan dekonsentrasi dan desentralisasi menandakan adanya pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam suatu negara kesatuan. Dengan demikian, pemerintah daerah mendapat kewenangan atas hal-hal yang berkaitan dengan pemerintah pusat.

Struktur pemerintahan nasional mengalami perubahan seiring dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2014. Modifikasi sistem pemerintahan nasional tercermin dalam prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan. Ide-ide awal yang tersentralisasi digantikan oleh ide-ide yang terdesentralisasi dengan disahkannya Undang-undang ini.¹ Daerah provinsi dan kabupaten/kota kini mempunyai tanggung jawab pemerintahan yang berbeda sesuai dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah Tahun 2014, khususnya Undang-Undang Nomor 23. Menegakan dan menegakkan ketentraman dan ketertiban

¹ Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

masyarakat merupakan salah satu tugas pemerintah daerah, khususnya pemerintah Kabupaten/Kota.²

Proses urbanisasi mempengaruhi penghidupan masyarakat dalam berbagai cara, baik dampak positif maupun negatif. Saat ini, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan menjadi fokus utama pertumbuhan perkotaan di Indonesia, terutama di kota-kota seperti Jakarta dan Surabaya. Hal ini melibatkan pembangunan lingkungan kelas atas, kawasan bisnis, gedung perkantoran, dan fasilitas rekreasi modern. Meskipun demikian, masih terdapat keterbatasan yang signifikan terhadap kemampuan pemerintah dalam menyediakan infrastruktur dan fasilitas bagi masyarakat berpenghasilan rendah, seperti perumahan yang layak dan terjangkau serta pengembangan daerah tertinggal.

Tata guna lahan dan pengelolaan pembangunan perkotaan pada hakikatnya saling terkait, dan pengelolaan pertumbuhan perkotaan harus selalu selaras dengan rencana tata ruang wilayah yang dinamis dan peka terhadap kebutuhan masyarakat. Tujuannya adalah membangun kota yang sukses, layak huni, berkeadilan sosial, dan berkelanjutan sekaligus mendorong pertumbuhan regional yang seimbang dan harmonis. Untuk mencapai tujuan tersebut, semua pihak yang terlibat harus bekerja sama.

Kota Jambi telah berkembang menjadi pusat industri, jasa, dan perdagangan. Industri ini menonjol dalam perekonomian lokal karena potensi lapangan kerja yang

² Lihat Pasal 1 angka 3 Undang-undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

besar. Ibu kota Provinsi Jambi adalah Kota Jambi yang terletak di Indonesia. Secara geografis, Sungai Batanghari membelah Kota Jambi menjadi dua, dan Jembatan Aur Duri menghubungkan kedua bagian tersebut. Dengan luas daratan kurang lebih 204,38 kilometer persegi, Kota Jambi dihuni oleh 610.854 jiwa.³

Motto Kota Jambi adalah “Tanah Pilih Pesako Betuah”. Secara filosofis, Kota Jambi merupakan inti sosial, ekonomi, dan budaya yang utama selain berperan sebagai pusat pemerintahan kota. Ini mewakili semangat komunitas masyarakatnya, yang berfungsi sebagai utusan keharmonisan bagi individu, keluarga, dan organisasi. Selain itu, Kota Jambi menghormati dan berpegang teguh pada norma-norma daerah, hukum adat, dan peraturan perundang-undangan terkait baik secara kelembagaan maupun pribadi.

Sesuai dengan rencana kebijakan daerah Provinsi Jambi, Kota Jambi berfungsi sebagai Pusat Pelayanan Nasional (PKN). Kota Jambi memerlukan infrastruktur dan layanan perkotaan dengan intensitas tinggi, termasuk listrik, air bersih, sistem pembuangan limbah, pembuangan air limbah, dan jaringan telekomunikasi, karena kota ini tergolong sebagai pusat kegiatan sekunder dan tersier.

Peraturan yang dikenal dengan PERWAL Nomor 11 Tahun 2019 yang berisi petunjuk teknis penciptaan dan pengkajian Kelurahan bersih, aman, dan cerdas di Kota Jambi diumumkan oleh pemerintah kota. Proyek inisiatif ini berupaya untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dan meningkatkan kesejahteraan serta

³ <https://bpsjambi.com> dikunjungi tanggal 15 Februari 2021

kesejahteraan ekonomi masyarakat dengan mempercepat pembangunan, tata kelola, dan pertumbuhan sosial Kota Jambi. Aturan ini bertujuan untuk memfasilitasi pembentukan perusahaan mandiri dalam kelompok masyarakat, mendorong pemerataan pembangunan, dan mempercepat pembangunan kecamatan. Selain itu, semangat gotong royong dan gotong royong dalam masyarakat diharapkan dapat ditumbuhkan melalui norma-norma tersebut. Terciptanya iklim persaingan yang positif antar Kelurahan dalam kelurahan dan kelurahan dalam Kota Jambi adalah tujuan akhirnya. Program ini telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Jambi.

Program ini telah menunjukkan keberhasilan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya di wilayah Kecamatan Paal Merah, di mana partisipasi masyarakat dan pemuda sangat tinggi. Hal ini terlihat dari peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup warga yang terlibat dalam program ini sejak 2014.

Pada tahun 2014, Program Kampung Bantar diluncurkan. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Jambi meluncurkan kegiatan sosialisasi, dan warga sekitar (RT) meresponsnya. Itu adalah proses yang mudah. Setelah itu, RT mengajukan menjadi Kampung Bantar dengan mendaftarkan secara sah ke kecamatan. Kecamatan tersebut selanjutnya menjadi Kampung Bantar dengan mendaftar pada Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat Perempuan dan Anak. Singkatnya, keterlibatan masyarakat sangat penting untuk keberhasilan program menuju Kampung Bantar. Satu-satunya organisasi yang memberikan arahan kampanye ini adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi. Hanya tiga Teknisi Tetap (RT) yang berpartisipasi ketika program ini dimulai

pada tahun 2014; ketiga RT ini berlokasi di Kecamatan Danau Sipin, Danau Teluk, dan Paal Merah. Ketika layanan ini pertama kali diperkenalkan kepada masyarakat, anggapan umum bahwa layanan ini kekurangan dana, sehingga tidak menghasilkan banyak minat. Proyek ini secara eksklusif memberikan tindakan yang dimaksudkan untuk melindungi lingkungan masyarakat lokal sesuai dengan tiga indikator program—Bersih, Aman, dan Cerdas.

Pemerintah Kota Jambi meluncurkan rencana ini untuk mengatasi kesenjangan sosial ekonomi yang ada antara masyarakat yang tinggal di pusat kota dan mereka yang tinggal di kabupaten atau pinggiran kota, selain untuk memenuhi tujuan resmi. Pembangunan gedung di pusat kota dan kawasan perbatasan menurut Pemerintah Kota Jambi tidak merata. Selain itu, terdapat perbedaan nyata antara kemampuan ekonomi masyarakat yang tinggal di pusat kota dengan masyarakat yang tinggal di kabupaten atau kota perbatasan. Perbedaan-perbedaan penting inilah yang mendorong terciptanya inisiatif Kampung Bantar yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan Kota Jambi. Untuk memitigasi ketimpangan pembangunan di Jambi, tujuan kami adalah meningkatkan kesejahteraan dan menstimulasi perekonomian masyarakat, dengan fokus di wilayah RT Kampung BANTAR.

Diharapkan wilayah Kota Jambi bebas narkoba dan minuman beralkohol, bebas dari tindak pidana, prostitusi, maksiat, kekerasan dalam rumah tangga, perceraian rumah tangga, eksploitasi anak, serta adanya komitmen yang kuat untuk mencapai mufakat dalam rangka melaksanakan kegiatan SDI komunitas. Terdapat peluang untuk membentuk lembaga pemberdayaan ekonomi masyarakat, lembaga pendidikan, dan

kelompok yang fokus pada peningkatan sumber daya manusia, kesejahteraan sosial, pengembangan masyarakat, pelibatan pemuda, organisasi keagamaan, dan pengelolaan lingkungan hidup, khususnya pada domain pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, , keamanan, dan ketertiban. Tujuan dari program-program tersebut adalah untuk memaksimalkan potensi sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat.

Maksud dan tujuan Pemerintah Kota Jambi sudah sangat jelas. Kota Jambi ingin menjadi pusat perdagangan dan jasa, mengedepankan pengembangan masyarakat yang sadar moral dan budaya serta mengedepankan pelayanan prima kepada konsumen. Tujuan Kota Jambi adalah memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan meningkatkan efektivitas birokrasi. Kota ini juga ingin meningkatkan keselamatan publik, penegakan hukum, dan kesejahteraan umum. Selain mengelola infrastruktur perkotaan, utilitas, dan perencanaan lingkungan, kota ini juga bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan dan infrastruktur masyarakat. Terakhir, Pemkot ingin meningkatkan potensi perekonomian kawasan perkotaan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, Walikota Kota Jambi menggunakan teknik inventif. Ia mengusung konsep Kampung Bantar, sebuah dusun yang cerdas, aman, dan higienis. Dewan Kota Jambi mencanangkan Program Kampung Bantar (Pintar, Aman, dan Bersih) sebagai upaya mempercepat pertumbuhan.⁴ Pembangunan adalah proses yang berkesinambungan dalam mengembangkan

⁴ Dokumentasi Pemerintah Kota Jambi, 2018

perbaikan dan pengembangan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan utama Program Kampung Bantar adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang diukur melalui upaya ekonomi dan non-ekonomi, seperti perbaikan di bidang sosial, hukum, dan budaya. Dari sudut pandang ekonomi, pertumbuhan ekonomi jangka panjang atau proses peningkatan pendapatan per kapita yang berkelanjutan disebut sebagai pembangunan ekonomi. Hal ini tidak hanya mendorong peningkatan pendapatan per kapita tetapi juga mengurangi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan. Untuk meningkatkan produksi secara keseluruhan, setiap sumber daya yang dapat dimanfaatkan potensi dan pengembangannya harus didistribusikan secara efektif dan efisien.

Melalui implementasi inisiatif Kampung Bantar, Pemerintah Kota Jambi berupaya menyelesaikan permasalahan ketidakmerataan pembangunan di Kota Jambi. Pemerintah Kota Jambi memandang rencana ini sebagai pendorong utama tercapainya kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka memberikan rekomendasi teknis penyelenggaraan Kampung Bantar ((Pintar, Aman, dan Bersih), telah diterbitkan Peraturan Walikota Jambi Nomor 11 Tahun 2019. Tujuan utamanya adalah untuk mendorong pemerataan pembangunan, khususnya di tingkat kecamatan, dan meningkatkan kesadaran lingkungan masyarakat melalui upaya gotong royong. Bekerja sama.

Pemerintah Kota Jambi meluncurkan Program Kampung Bantar (Pintar, Aman, dan Bersih) sebagai proyek untuk meningkatkan kesehatan penduduk perkotaan dan mempercepat pembangunan. Peraturan Walikota Jambi, khususnya Nomor 47 Tahun

2014 dan Nomor 11 Tahun 2019, yang mengatur parameter teknis pelaksanaan dan penilaian program, mengatur tentang program tersebut.

Indikator utama Program Kampung Bantar meliputi:

1. Kebersihan (Bersih): Masyarakat didorong untuk menjaga lingkungan yang bersih dengan partisipasi aktif dalam kegiatan seperti gotong royong membersihkan lingkungan, pengelolaan sampah, dan penghijauan.
2. Keamanan (Aman): Program ini juga fokus pada peningkatan keamanan lingkungan melalui pembentukan pos kamling, penerangan jalan yang memadai, serta pelatihan bagi warga dalam menghadapi situasi darurat.
3. Kepintaran (Pintar): Masyarakat didorong untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan dengan menyediakan akses ke pendidikan informal, pelatihan keterampilan, dan kegiatan budaya serta olahraga.

Program Kampung Bantar merupakan wujud kewajiban pemerintah untuk memajukan kesejahteraan rakyat, karena tujuan dibentuknya pemerintahan adalah untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan yang sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945. Dengan demikian, dua hal yang harus diprioritaskan oleh pemerintah yang bertanggung jawab adalah sebagai berikut:

- a) Keterhubungan yang sebaik-baiknya antara prioritas pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan nasional dan

- b) Pemerintahan yang aktif berupaya mencapai tujuan nasional Indonesia dan berjalan secara efektif dan efisien sangat diharapkan.⁵

Program Kampung Bantar juga mengadvokasi terciptanya kepastian hukum. Menegakkan hukum yang adil adalah salah satu tanggung jawab pemerintah yang paling sulit, namun juga penting bagi penyelenggaraan dan kemajuan negara. Untuk membangun kredibilitas pemerintah dan menunjukkan profesionalisme, kejelasan hukum sangatlah penting. Hal ini penting untuk mendorong pembangunan dan menjalankan pemerintahan secara efisien. Berbagai kebijakan publik perlu dirumuskan secara tepat guna menjaga kepastian hukum. Pada akhirnya, agar konsep atau rekomendasi tersebut sah secara hukum, konsep atau rekomendasi tersebut harus dimasukkan dalam sistem legislatif dan memiliki kerangka hukum yang tepat dan tidak ambigu.⁶

Melalui inisiatif Kampung Bantar, pemerintah secara sistematis dan berhasil memajukan pembangunan masyarakat. Melalui pemanfaatan kelompok masyarakat, Pemerintah dengan kekayaan ilmu pengetahuannya berhasil membina masyarakat.

Kota Jambi diberikan otonomi daerah melalui Program Kampung Bantar yang memungkinkannya berkembang sesuai potensi dan kemampuannya. Peraturan Walikota Jambi Nomor 11 Tahun 2019 yang memuat standar teknis penciptaan dan penilaian Kelurahan bersih, aman, dan cerdas di Kota Jambi mengatur program ini.

⁵ Edy Topo Ashari dan Desi Fernanda, *Membangun Kepemerintahan yang Baik*, (Jakarta: LAN-RI, 2001), hlm. 62.

⁶ Edy Topo Ashari dan Desi Fernanda, *Membangun Kepemerintahan yang Baik*, hlm. 72-73

Pemerintah Kota Jambi berkomitmen menjalankan Program Kampung Bantar guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Baik masyarakat maupun pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab untuk menjaga taraf hidup di daerahnya. Pemerintah mampu membuat Program Kampung Bantar yang tepat dan dapat dilaksanakan setiap tahun berdasarkan kebutuhan masyarakat. Berdasarkan inisiatif pemerintah, program Kampung Bantar telah berjalan efektif selama lima tahun di berbagai wilayah Kota Jambi dengan tujuan untuk meningkatkan kebersihan, keamanan, dan kecerdasan. Program ini dimulai oleh Pemerintah Kota Jambi sebagai respon atas maraknya permasalahan sanitasi yang tidak memadai dan ketidakpedulian masyarakat tertentu terhadap lingkungan sekitarnya. Selain itu, terdapat penurunan nyata dalam kesediaan untuk bekerja sama dan rasa kekompakan sosial.

Selama wilayah masing-masing RT memenuhi standar yang ditetapkan oleh panel penilaian Kampung Bantar, maka RT yang telah berpartisipasi aktif dalam inisiatif Kampung Bantar diakui dan diberi penghargaan oleh program tersebut. Setiap tahunnya program ini dilombakan, dimulai dari lomba tingkat kecamatan, berlanjut ke turnamen tingkat kecamatan, hingga akhirnya melibatkan seluruh Kota Jambi. Tujuan dari kompetisi ini adalah untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam inisiatif Kampung Bantar.

Kelurahan Telanaipura merupakan salah satu kelurahan di Kota Jambi yang berpartisipasi dalam Program Kampung Bantar. Program Kampung Bantar belum berjalan secara optimal karena masih ditemukannya kekurangan tong sampah kebersihan di setiap rumah, tidak adanya penjaga lingkungan atau ronda malam yang

di lakukan warga secara bergantian untuk mengawasi keamanan lingkungan dari kriminalitas pencurian, dan jarang dilakukannya kerja sama atau bakti sosial (Gotong Royong) sehingga program kampung bantar yang ada di Kelurahan Telanaipura tidak seusai dengan Peraturan Walikota Jambi Nomor 14 tahun 2017 yang mana telah di atur tata cara secara teknis dan belum memenuhi sesuai harapan masyarakat kelurahan Telanaipura Kota Jambi.

Saat ini, masih kurangnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya disiplin, tanggung jawab, dan kepedulian dalam menjaga lingkungan yang sehat. Hanya tahap penilaian inisiatif Kampung Bantar (Pintar, Aman, dan Bersih) yang terbuka untuk diikuti sertakan. Namun demikian, kategori BANTAR (Pintar, Aman, dan Bersih) tidak sejalan dengan kondisi dan keadaan setempat. Pada tahun 2016, 2017, dan 2018, RT 04 Kelurahan Telanaipura mengikuti lomba Kampung Bantar (bersih, aman, dan cerdas). Meski RT 04 selalu ikut serta, namun dalam tiga tahun penyelenggaraannya tidak pernah menang. Pantauan langsung di lapangan menunjukkan, RT 04 yang masuk kategori BANTAR (Pintar, Aman, dan Bersih) masih belum tertata rapi.

Untuk pemernang lomba kampung Bantar pada tahun 2018 tidak ada satupun pemenang dari Kelurahan Telanaipura. Untuk mengetahui pemenang lomba kampung bantar dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1
Daftar Pemenang Lomba Kampung Bantar

No	RT	Kelurahan	Kecamatan	No	RT	Kelurahan	Kecamatan
1	49	Kenali Asam	Kota Baru	32	9	Solok Sipin	Danau Sipin
2	18	Kenali Asam Atas	Kota Baru	33	8	Pakuan Baru	Jambi Selatan
3	22	Kenali Asam Atas	Kota Baru	34	32	Kenali Asam Bawah	Kota Baru
4	6	Simpang III Sipin	Kota Baru	35	39	Simpang III Sipin	Kota Baru
5	21	Pasir Putih	Jambi Selatan	36	37	Payo Selincah	Paal Merah
6	9	Kenali Asam Atas	Kota Baru	37	7	Sungai Asam	Pasar Jambi
7	19	Kenali Asam Atas	Kota Baru	38	5	Sungai Asam	Pasar Jambi
8	56	Eka Jaya	Paal Merah	39	15	Kebun Handil	Jelutung
9	55	Eka Jaya	Paal Merah	40	21	Cempaka Putih	Jelutung
10	3	Talang Bakung	Paal Merah	41	15	Talang Banjar	Jambi Timur
11	50	Lingkar Selatan	Paal Merah	42	31	Penyengat Rendah	Telanaipura
12	28	Paal Merah	Paal Merah	43	4	Tanjung Pasir	Danau Teluk
13	42	Eka Jaya	Paal Merah	44	1	Buluran Kenali	Telanaipura
14	1	Paal Merah	Paal Merah	45	3	Jelmu	Pelayangan
15	12	Handil Jaya	Jelutung	46	1	Tanjung Raden	Danau Teluk
16	5	Tanjung Pinang	Jambi Timur	47	4	Buluran Kenali	Telanaipura
17	21	Tanjung Sari	Jambi Timur	48	2	Tanjung Raden	Danau Teluk
18	8	Sijenjang	Jambi Timur	49	12	Sukakarya	Kota Baru
19	3	Kasang	Jambi Timur	50	38	Thehok	Jambi Selatan

No	RT	Kelurahan	Kecamatan	No	RT	Kelurahan	Kecamatan
20	19	Pematang Sulur	Telanaipura	51	27	Kenali Asam Atas	Kota Baru
21	18	Buluran Kenali	Telanaipura	52	13	Murni	Danau Sipin
22	1	Olak Kemang	Danau Teluk	53	14	Murni	Danau Sipin
23	10	Penyengat Rendah	Telanaipura	54	4	Beringin	Pasar Jambi
24	3	Bagan Pete	Alam Barajo	55	44	Eka Jaya	Paal Merah
25	34	Mayang Mangurai	Alam Barajo	56	3	Sungai Asam	Pasar Jambi
26	57	Kenali Besar	Alam Barajo	57	39	Jelutung	Jelutung
27	3	Kenali Besar	Alam Barajo	58	18	Cempaka Putih	Jelutung
28	10	Solok Sipin	Danau Sipin	59	12	Lebak Bandung	Jelutung
29	32	Rawasari	Alam Barajo	60	21	Payo Lebar	Jelutung
30	33	Kenali Besar	Alam Barajo	61	14	Pematang Sulur	Telanaipura
31	18	Murni	Danau Sipin	62	3	Mudung Laut	Pelayangan

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat., 2024

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan bahwa Kecamatan Kota Baru, Danau Sipin, dan Paal Merah memiliki banyak RT yang memenangkan lomba, menunjukkan bahwa wilayah-wilayah ini memiliki potensi yang tinggi dalam penerapan program Kampung Bantar. Adapun beberapa kelurahan seperti Kenali Asam Bawah, Kenali Asam Atas, dan Eka Jaya tampak sangat aktif dan berhasil dalam lomba ini.

Putri pernah melakukan kajian dengan judul "Evaluasi Kebijakan Walikota dalam Mewujudkan Kelurahan Bersih, Aman, dan Cerdas (BANTAR) di Kabupaten Kota Baru Jambi." Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya Kabupaten Kota Baru

dalam memperkenalkan Kampung Bantar belum berhasil. Buktinya, belum semua Tim Daerah (RT) di Kecamatan Kota Baru mengikuti program Kampung BANTAR.⁷ Penelitian “Evaluasi Kebijakan Kampung Bantar di Kecamatan Paal Merah” dilakukan oleh Prabawa. Kesimpulan diskusi menunjukkan bahwa penerapan kebijakan program Kampung Bantar di Kecamatan Paal Merah belum mencapai potensi efisiensi secara maksimal. Fakta bahwa masih ada RT yang belum berpartisipasi dalam kampanye ini menjadi buktinya.⁸

Berdasarkan perbandingan dengan beberapa penelitian mengenai Evaluasi Program kampung Bantar dalam berbagai bentuk penulisan melihat proses pelaksanaannya, yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penulis lebih menekankan tentang Evaluasi Program Kampung Bantar di Kelurahan Telanaipura Kecamatan Telanaipura Kota Jambi yang bertujuan agar kampung menjadi bersih aman dan pintar dapat dilakukan dengan mudah, efisien, dilakukan secara bersama musyawarah dan mufakat.

Berdasarkan observasi awal di lapangan bahwa pelaksanaan Kampung Bantar yang berada di Kelurahan Telanaipura Kecamatan Telanaipura Kota Jambi khususnya RT 04 belum berjalan secara optimal karna masih banyak terdapat hambatan-hambatan baik dari segi sarana maupun prasarana. Berdasarkan pemaparan masalah di atas maka

⁷ Putri, Aulia Cindy Dwi. Evaluasi Kebijakan Walikota dalam Mewujudkan Kampung Bersih Aman dan Pintar (BANTAR) di Kecamatan Kota Baru Jambi. (2019) eprints.ipdn.ac.id (dikunjungi tanggal 16 Desember 2020 : 04.52 Wib

⁸ Prabawa, Hersens Nursa. Evaluasi Kebijakan Kampung Bantar di Kecamatan Paal Merah. Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP) Vol. 2, No. 1, Februari 2020: 33 – 44

penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Evaluasi Pelaksanaan Program Kampung Bantar Di Kelurahan Telanaipura Kecamatan Telanaipura Kota Jambi”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang informasi yang diberikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana evaluasi pelaksanaan Program Kampung Bantar di Kelurahan Telanaipura Kecamatan Telanaipura Kota Jambi ?
2. Bagaimana kendala dalam pelaksanaan Program Kampung Bantar di Kelurahan Telanaipura Kecamatan Telanaipura Kota Jambi?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masakah, maka tujuan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui evaluasi pelaksanaan program Kampung Bantar di Kelurahan Telanaipura Kecamatan Telanaipura Kota Jambi.
2. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan Program Kampung Bantar di Kelurahan Telanaipura Kecamatan Telanaipura Kota Jambi.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas maka manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan perspektif signifikan dan ide-ide baru bagi kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ilmu pemerintahan dan sosial.

b. Manfaat Praktis

Tujuan dari studi ini adalah untuk memberikan perspektif dan data yang signifikan kepada pemerintah untuk pembuatan kebijakan teknis yang dituangkan dalam Perwal Nomor 14 Tahun 2017. Tujuannya adalah untuk memastikan Kampung Bantar dapat mengikuti peraturan dan meningkatkan infrastruktur dan fasilitasnya dengan tepat.

1.5. Landasan Teori

1.5.1 Kebijakan Publik

Kebijakan biasanya digunakan untuk menentukan dan menguraikan keputusan-keputusan paling penting untuk memperbaiki kehidupan, baik dalam konteks kebijakan publik atau perusahaan swasta.⁹ Kebijakan publik mengacu pada keputusan yang dibuat oleh pemerintah sebagai respons terhadap isu politik atau krisis publik. Pilihan ini didukung oleh norma dan nilai. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menyeimbangkan perbedaan yang ada antara norma dan cita-cita dengan keadaan sebenarnya. Dalam pengertian ini, “kebijakan publik” secara khusus mengacu pada

⁹ Sahya Anggara, Kebijakan Publik, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm. 14.

pilihan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah, serta tujuan menyeluruh yang mengarahkan pilihan dan tindakan tersebut. Kebijakan menawarkan arahan untuk memilih tindakan dan keputusan yang paling mungkin memberikan hasil yang diinginkan.¹⁰ Pendapat umum menyatakan bahwa kebijakan publik, atau pilihan yang diambil pemerintah dalam mengatasi permasalahan politik atau isu publik, itulah yang dimaksud dengan kebijakan pemerintah.

Tujuan kebijakan publik adalah sebagai berikut: a) alokasi dan redistribusi sumber daya; b) pengaturan dan pemajuan kebebasan; c) stabilitas dan promosi perubahan; dan d) penguatan kewenangan negara dan efektivitas pasar. Proses pembuatan kebijakan atau pengaruhnya dilakukan secara aktif oleh para pembuat kebijakan.

Seseorang yang memiliki kekuasaan untuk membuat kebijakan dan prosedur di tingkat mana pun—internasional, nasional, regional, atau lokal—dikenal sebagai pembuat kebijakan. Berbagai aktor membedakan pembentukan kebijakan publik. Individu seperti politisi, pegawai negeri, pelobi, konsultan, auditor, dan lain-lain adalah contoh pelaku. Mereka memiliki kapasitas untuk menyusun, merumuskan, menilai, dan menyetujui kebijakan.

Proses lima langkah pembuatan kebijakan William N. Dunn didukung oleh berbagai elemen. Fase-fase ini meliputi penetapan agenda, pengembangan kebijakan, adopsi, evaluasi, dan penilaian. Masalahnya dikenali dan didefinisikan sebelum

¹⁰ Thei Geurts, *Public Policy Making: The 21st Century Perspective*, (Netherlands: Be Informed, 2011), hlm. 6.

mengembangkan agenda kebijakan. Perkiraan opini kemudian digunakan dalam proses pengembangan kebijakan. Ide-ide yang muncul dijadikan bahan pertimbangan untuk pengambilan kebijakan. Proses evaluasi kebijakan diawasi dengan ketat. Terakhir, mekanisme penilaian dan evaluasi kebijakan diterapkan.

Instansi Pemerintah Daerah adalah organisasi pemerintahan mandiri yang berkedudukan di daerah tertentu. Mereka diberi kewenangan mandiri dan diberi kewenangan oleh pemerintah pusat untuk mengatur pemerintahan daerah. Walikota dan Perangkat Daerah merupakan dua anggota utama Pemerintah Daerah; mereka berfungsi sebagai divisi administratif badan.¹¹

Kebijakan merupakan kumpulan tindakan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka mencapai tujuan tertentu dalam proses penyelesaian permasalahan yang dihadapi masyarakat. Kebijakan-kebijakan ini biasanya diberlakukan melalui undang-undang, inisiatif, dan program yang melibatkan sejumlah pemangku kepentingan, termasuk sektor publik dan komersial. Beberapa komponen utama kebijakan publik adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah: Tahap pertama dalam kebijakan publik adalah mengidentifikasi masalah yang perlu diatasi. Ini melibatkan penelitian dan analisis untuk memahami isu-isu yang dihadapi oleh masyarakat dan menentukan prioritas yang perlu ditangani.

¹¹ Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat (2).

2. **Formulasi Kebijakan:** Setelah masalah diidentifikasi, langkah berikutnya adalah merumuskan kebijakan yang dapat mengatasi masalah tersebut. Ini melibatkan pengembangan berbagai opsi kebijakan dan evaluasi potensi dampaknya.
3. **Pengambilan Keputusan:** Dalam tahap ini, pemerintah memutuskan opsi kebijakan mana yang akan diadopsi. Proses ini melibatkan diskusi dan negosiasi di antara para pembuat kebijakan, serta konsultasi dengan para pemangku kepentingan.
4. **Implementasi Kebijakan:** Eksekusi kebijakan dilakukan setelah keputusan diambil. Untuk memastikan bahwa tujuan kebijakan tercapai, hal ini melibatkan pengalokasian sumber daya, pelaksanaan program, dan pengawasan penerapan kebijakan.
5. **Evaluasi Kebijakan:** Evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas kebijakan setelah diimplementasikan. Ini melibatkan pengumpulan data dan analisis untuk melihat apakah kebijakan tersebut berhasil mengatasi masalah yang diidentifikasi pada awalnya dan mencapai tujuan yang diinginkan.

Sebagai contoh, Program Kampung Bantar di Kota Jambi merupakan sebuah kebijakan publik yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan lingkungan, keamanan, dan pendidikan. Kebijakan ini mencakup berbagai langkah, mulai dari penyusunan peraturan teknis, pelibatan masyarakat dalam kegiatan gotong royong, hingga evaluasi dampak program terhadap kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan publik yang baik biasanya memiliki beberapa karakteristik, seperti jelasnya tujuan yang ingin dicapai, partisipasi aktif dari masyarakat, dukungan dari berbagai pemangku kepentingan, serta adanya mekanisme evaluasi untuk menilai keberhasilan kebijakan tersebut.

1.5.2. Konsep Evaluasi Kebijakan

Kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris; dalam bahasa Indonesia disebut evaluasi, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut evaluasi. Penilaian adalah yang dimaksud dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dengan penilaian.¹² Oleh karena itu, penilaian dapat diartikan sebagai tindakan melakukan penilaian, dan penilaian itu sendiri dapat dicirikan sebagai proses evaluasi. Para ahli yang berbeda-beda memandang evaluasi dengan cara yang berbeda-beda.

Evaluasi adalah proses metodis yang menentukan kondisi yang tepat di mana tujuan tertentu dapat dicapai. Selalu ada proses yang terlibat dalam evaluasi. Bahasa perilaku sering kali mewakili tujuan spesifik yang harus diselaraskan dengan proses evaluasi, karena perilaku yang berbeda memerlukan metode evaluasi yang berbeda. Akibatnya, evaluasi menjadi lebih sulit dan rumit.¹³ Ada yang berpendapat bahwa evaluasi adalah tugas yang sulit.

¹² <http://kbbi.web.id/evaluasi>, diakses pada tanggal 20 Mei 2024, pukul 14.44 WIB.

¹³ M. Sukardi, *Evaluasi Pendidikan : Prinsip dan Operasionalnya*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm.1

Penilaian berkaitan dengan tindakan pengukuran dan pemeringkatan. Dari sudut pandang global, evaluasi mencakup aktivitas menilai atau menilai sesuatu, sedangkan pengukuran adalah tindakan mengukur sesuatu.¹⁴

Evaluasi menurut Wirawan adalah proses pengumpulan data mengenai suatu subjek penelitian secara metodis dan mengevaluasinya berdasarkan kriteria yang telah ditentukan.¹⁵ Data yang berkaitan dengan objek penilaian dimasukkan ke dalam hasil, dan data ini kemudian digunakan untuk membuat penilaian terhadap objek yang bersangkutan. Topik tinjauan dapat mencakup kebijakan, inisiatif, program, staf, orang, objek, dan sebagainya. 5. Menurut Wirawan, evaluasi adalah suatu proses yang menghasilkan kumpulan data yang dapat digunakan sebagai pedoman pengambilan keputusan karena membandingkan sesuatu dengan standar evaluasi yang telah ditetapkan. Efektivitas.

Widoyoko mengutip perkataan Stufflebeam dan Shinkfield bahwa:

“Evaluation is the methodical process of obtaining and evaluating data in order to determine the importance and efficacy of an object's objectives, design, and overall impact. Its goals are to improve understanding of the phenomena under evaluation, guarantee accountability, and provide information for decision-making.

”¹⁶

Definisi penilaian yang diberikan di atas menunjukkan bahwa evaluasi adalah suatu prosedur metodis dengan tujuan mengumpulkan dan menyajikan berbagai data

¹⁴ *Ibid*, hlm 6

¹⁵ Wirawan, *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia: Teori, Aplikasi, dan Penelitian*, (Jakarta: Salemba Empat, 2012), hlm.3

¹⁶ *Ibid*

yang dapat digunakan sebagai pendukung diskusi selama proses pengambilan keputusan.

Pandangan berbeda mengenai evaluasi diungkapkan oleh Komite Pengkajian Nasional (Panitia Evaluasi), menurut Widoyoko, sebagai berikut:

“Evaluation is a methodical process that selects pertinent information with care, collects and analyzes data, and presents the results to decision makers in a clear and useful summary that helps them select the best option from a range of options.”¹⁷

Dari pengertian penilaian di atas maka evaluasi adalah suatu prosedur sistematis yang dimulai pada tahap seleksi dan diakhiri dengan penyajian informasi yang menjadi dasar pengambilan keputusan.

Beberapa definisi para ahli menunjukkan bahwa evaluasi lebih dari sekedar pengukuran atau penilaian; ini adalah proses yang terencana dan sistematis. Hal ini memerlukan perolehan, evaluasi, dan penyajian data secara metodis untuk mendukung pengambilan keputusan guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Oleh karena itu, penilaian merupakan suatu proses yang kompleks dan berkesinambungan yang berupaya untuk menentukan manfaat suatu kegiatan guna sampai pada suatu keputusan akhir.

Evaluasi kebijakan digunakan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kebijakan publik. Menurut Muhadjir dalam Widodo mengemukakan “Evaluasi kebijakan publik merupakan suatu proses untuk menilai seberapa jauh suatu

¹⁷ Eko Putro Widoyoko, *Evaluasi Program Pembelajaran*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hal. 3

kebijakan publik dapat “membuahkan hasil”, yaitu dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan dan/atau target kebijakan publik yang ditentukan”.¹⁸

Dalam bahasa yang lebih singkat Jones dalam Winarno mengartikan evaluasi adalah “Kegiatan yang bertujuan untuk menilai “manfaat” suatu kebijakan”.³⁹ Serta secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai “Kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang menyangkut substansi, implementasi, dan dampak”.¹⁹ Hal ini berarti bahwa proses evaluasi tidak hanya dapat dilakukan pada tahapan akhir saja, melainkan keseluruhan dari proses kebijakan dapat dievaluasi.

Secara umum, evaluasi sebagai suatu prosedur atau kegiatan mencapai tiga tujuan utama:

- a. menilai kemajuan,
- b. membantu dalam pengembangan rencana,
- c. merekondisi atau meningkatkan sekali lagi.²⁰

Tindakan evaluasi pada hakikatnya dimaksudkan untuk mendukung perbaikan atau kemajuan. Banyak aktivitas yang menggabungkan evaluasi berkelanjutan untuk memudahkan pelacakan dan evaluasi pencapaian tujuan. Asesor mempunyai kesempatan untuk menentukan apakah tujuan akan tercapai dalam jangka waktu yang ditentukan melalui evaluasi yang berkelanjutan. Penilai akan secara metodis

¹⁸ Joko Widodo, *Analisis Kebijakan Publik*, (Jakarta. Bayumedia, 2008), hal.13

¹⁹ Budi Winarno. *Kebijakan Publik*, (Jakarta : Pt. Buku Kita, 2008), hal. 102

²⁰ *Ibid*

menemukan dan memeriksa penyebab dan solusi alternatif jika data evaluasi menunjukkan bahwa tujuan tidak akan tercapai sebagaimana dimaksud.²¹

Sebagai salah satu tahapan dalam proses kebijakan, evaluasi memiliki fungsi dan tujuan. Menurut Wibawa dalam Nugroho, evaluasi kebijakan publik memiliki empat fungsi, yaitu:

a. Eksplanasi.

Melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antar berbagai dimensi realitas yang diamatinya. Dari evaluasi ini evaluator dapat mengidentifikasi masalah, kondisi, dan aktor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan kebijakan.

b. Kepatuhan.

Melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan oleh para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainnya, sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan.

c. Audit.

Melalui evaluasi dapat diketahui, apakah output benar-benar sampai ke tangan kelompok sasaran kebijakan, atau justru ada kebocoran atau penyimpangan.

d. Akunting.

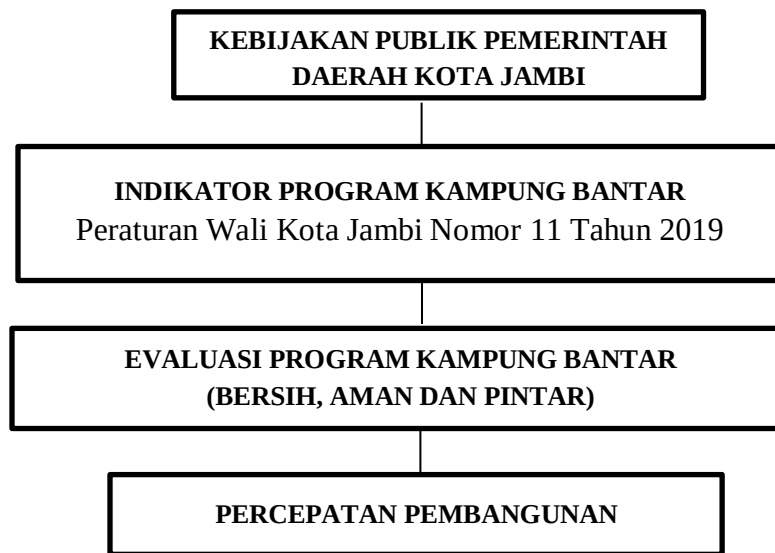
Dengan evaluasi dapat diketahui apa akibat sosioekonomi dari kebijakan tersebut.²²

²¹ *Ibid*

²² Riant Nugroho, *Public Policy*, (Jakarta : Elex Media Komputindo, 2009), 83.

1.6. Kerangka Berfikir

Sesuai dengan latar belakang dan teori yang dikemukakan dalam penelitian ini, maka kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Berfikir

1.7. Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Fokus skripsi penulis adalah penelitian kualitatif. Menurut Creswell, pendekatan kualitatif menyelidiki dan memahami makna yang diberikan oleh orang atau kelompok berbeda terhadap masalah sosial atau kemanusiaan. Pendekatan penelitian kualitatif ini terdiri dari beberapa tugas mendasar, seperti merumuskan pertanyaan dan prosedur, mengumpulkan data akurat dari partisipan, melakukan

analisis induktif terhadap data yang bergerak dari tema sempit ke tema lebih luas, dan menafsirkan makna data.²³.

Perlunya observasi langsung terhadap suatu fenomena di lapangan dan kemampuan penelitian kualitatif dalam mengumpulkan data baik tertulis maupun lisan dari pihak-pihak terkait menjadi alasan penulis memilih teknik kualitatif.

1.7.2 Lokasi / Objek Penelitian

Lokasi penelitian diadakan di Kelurahan Telanaipura Kecamatan Telanaipura Kota Jambi.

1.7.3 Fokus dan Dimensi Penelitian

Spradley menyoroti bahwa fokus penelitian kualitatif adalah menganalisis satu atau lebih domain yang terkait dengan situasi sosial, seperti dikutip Sugiyono. Derajat orisinalitas data yang diperoleh dari lingkungan sosial (lapangan) menentukan fokusnya. Peneliti melakukan pemeriksaan menyeluruh untuk memilih fokus penelitian. Peneliti akan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi sosial yang masih dalam tahap awal melalui kajian eksploratif ini.²⁴

Fokus dari penelitian ini adalah peneliti berfokus pada sejauh mana evaluasi program Kampung Bantar di Kelurahan Telanaipura Kecamatan Telanaipura Kota Jambi.

²³ John W. Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013), Hlm. 4-5.

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R dan D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), Hlm. 209.

1.7.4 Sumber Data

Sumber data memberikan informasi yang digunakan dalam upaya penelitian. Oleh karena itu, untuk melakukan penelitian ini, data terkait harus diperoleh dari organisasi yang terlibat dalam pengumpulan data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini secara umum akan dibagi menjadi dua kelompok:

1. Data primer

Sumber data primer adalah sumber yang memberikan informasi kepada orang atau organisasi yang mengumpulkan data secara langsung. Data primer dikumpulkan peneliti dari informan dan responden yang mempunyai pengetahuan mendalam terhadap topik tertentu yang diteliti. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan observasi.

2. Data sekunder

Data sekunder mengacu pada informasi yang tidak dikumpulkan secara langsung oleh pengumpul data, namun diperoleh secara tidak langsung melalui sumber seperti individu atau dokumen. Bukti penelitian ini konsisten dengan data asli, yang dapat ditemukan di berbagai sumber, termasuk catatan aktivitas, laporan, dokumen, dan foto.

1.7.5 Teknik Penentuan Informan

Pencarian informan merupakan suatu teknik yang digunakan oleh peneliti kualitatif untuk menentukan orang-orang mana yang akan menjadi sumber informasi utama (informan). Dalam penelitian kualitatif, informan dipilih berdasarkan keterlibatan langsung mereka dengan topik penelitian; teknik

pengambilan sampel tidak digunakan.²⁵. Ini adalah metode data kunci untuk mengidentifikasi informan. Melalui peninjauan langsung ke lokasi penelitian dan wawancara informan, peneliti mengumpulkan data primer.

Pengambilan sampel purposif lebih tepatnya, teknik pengambilan sampel sumber data adalah strategi pengambilan sampel yang digunakan. Landasan strategi ini adalah pemilihan sampel dengan data yang kaya atau lengkap.

Mereka yang ikut serta dalam penelitian sebagai informan antara lain:

1. Lurah Kelurahan Telanaipura
2. Staf Kantor Kelurahan Telanaipura
3. Sekretaris RT. 04 Kelurahan Telanaipura
4. Penduduk RT. 04 Kelurahan Telanaipura

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

Para peneliti menggunakan banyak teknik untuk mengumpulkan data primer, yang meliputi:

1. Wawancara (*interview*)

Pertukaran ide dan informasi secara kolaboratif antara dua orang disebut wawancara. Hal ini dibantu dengan serangkaian tanya jawab dengan tujuan menciptakan makna seputar topik tertentu. Wawancara penelitian, menurut pendapat Susan Stainback, menawarkan wawasan yang lebih mendalam tentang

²⁵ Pahrudin, Makmun Wahid,dkk., *Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, hlm. 24.

persepsi partisipan terhadap peristiwa dan fenomena dibandingkan dengan observasi sederhana.²⁶

Wawancara semi-terstruktur digunakan oleh peneliti selama studi mereka. Wawancara jenis ini termasuk dalam genre wawancara mendalam, yang dibedakan dengan wawancara terstruktur karena pendekatannya yang lebih fleksibel. Pendekatan wawancara khusus ini mendorong orang yang diwawancarai untuk mengungkapkan pendapat dan wawasan mereka guna mendorong penyelidikan tantangan yang lebih jujur. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu memperhatikan dengan seksama apa yang dikatakan informan dan mencatatnya.²⁷

2. Observasi

Menurut Cresswell, observasi adalah proses dimana para ilmuwan mengamati dengan cermat segala sesuatu di lapangan dengan menggunakan panca indera penglihatan, peraba, pendengaran, penciuman, dan perasa seringkali dengan bantuan alat atau teknologi, dan kemudian mencatat temuannya untuk penelitian di masa depan. Pertanyaan dan tujuan penelitian adalah sumber observasi tersebut. Marshall, sebaliknya, mengklaim bahwa peneliti belajar tentang perilaku dan pentingnya perilaku melalui observasi yang cermat.²⁸

²⁶ *Ibid.*, hlm.231-232

²⁷ *Ibid.*, hlm. 233

²⁸ Sugiyono, *Op.Cit*, hlm. 226.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data kualitatif terorganisir yang mencakup sejumlah besar data faktual dan data yang disimpan dalam bentuk fisik. Otobiografi, surat pribadi, buku atau buku harian, kenangan, kliping surat kabar, catatan pemerintah atau swasta, data server, dan data flash disk yang disimpan di situs web hanyalah beberapa contoh dari berbagai jenis bahan dokumenter. Foto, catatan kehadiran, laporan kegiatan, dan dokumen lainnya termasuk bahan yang dikutip dalam dokumentasi penelitian.²⁹

1.7.7 Teknik Analisis Data

Seperti yang diungkapkan Miles dan Huberman dalam Sugiyono, peneliti menggunakan analisis induktif untuk melakukan analisis. Pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penyusunan kesimpulan merupakan langkah-langkah dalam proses ini.

1.8 Pengumpulan data. Untuk mengumpulkan data, terlebih dahulu dilakukan observasi di lokasi penelitian yaitu Kelurahan Telanaipura di Kecamatan Telanaipura Kota Jambi. Setelah itu dilanjutkan dengan wawancara kepada informan penelitian. Para peneliti juga mendukung temuan mereka dengan dokumentasi.

1.9 Reduksi data. Praktik memilih data tertentu dan berfokus pada penyederhanaan, abstraksi, dan modifikasi data mentah dari wawancara

²⁹ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Pers, 2014), Hlm. 33.

dikenal sebagai reduksi data. Para ahli memeriksa data yang dikumpulkan untuk mendapatkan rincian terkait tentang inisiatif aksesibilitas dan layanan yang ditawarkan.

1.10 Presentasi Data. Penggambaran data terstruktur yang memungkinkan untuk menarik kesimpulan dan memilih langkah apa yang harus diambil selanjutnya dikenal sebagai penyajian data.

1.11 Menarik kesimpulan. Kesimpulannya adalah tahap terakhir dari sebuah proyek penelitian. Kesimpulan membantu dalam alur sebab dan akibat, konsistensi dalam pola penjelasan, serta penemuan dan pemahaman pentingnya. Temuan penelitian ini dengan jelas menjawab permasalahan yang ada dengan menawarkan solusi konklusif terhadap permasalahan yang diajukan.

1.7.8 Keabsahan Data (Triangulasi Data)

Penelitian kualitatif rentan terhadap kelemahan karena beberapa alasan. Pertama, faktor utama dalam penelitian kualitatif adalah subjektivitas peneliti. Kedua, terlalu bergantung pada instrumen penelitian seperti observasi dan wawancara dapat menimbulkan sejumlah kelemahan, terutama jika instrumen tersebut digunakan secara tidak terkendali atau transparan. Yang terakhir, keandalan temuan penelitian dapat sangat dipengaruhi oleh penggunaan sumber data kualitatif yang tidak dapat diandalkan. Untuk mengeksplorasi topik penelitian atau sosial, diperlukan mekanisme triangulasi yang mengintegrasikan berbagai sumber data, peneliti, teori, dan prosedur

metodologis. Karena setiap strategi mempunyai kelebihan dan kekurangan yang unik, triangulasi diperlukan. Oleh karena itu, triangulasi memungkinkan penggambaran realitas dengan lebih akurat.³⁰

³⁰ Pahrudin, Makmun Wahid,dkk.,*Op.Cit*, hlm.18